

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah salah satu Negara yang menjunjung Tinggi Nilai Demokratis dimana setiap orang mempunyai “Hak Asasi Manusia”. Selain itu Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki kekayaan suku budaya dan juga sering disebut sebagai Negara kepulauan. Hal ini adalah salah satu ciri Negara Indonesia, namun karena banyak sekali suku budaya dan pulau tersebut bukan menjadi suatu alasan untuk terpecah belah, karena Negara Indonesia memiliki suatu dasar yang tertera pada PANCASILA dan UUD 1945. Bentuk Negara Indonesia yang Demokratis ini membuat pemerintah mempunyai pekerjaan rumah yang sangat banyak dalam melayani masyarakat yang mempunyai hak atas apa yang diamanahkan kepada orang-orang yang bekerja dalam suatu pemerintahan pusat maupun daerah.

Pelaksanaan yang dapat dilakukan Negara demi memenuhi kebutuhan dalam setiap bagian geografis adalah dengan cara membagi tanggung jawab kepada setiap instansi pemerintah daerah untuk melayani masyarakat yang ada pada daerahnya masing-masing. Adanya perubahan sistem pemerintah dari sentralisasi menjadi desentralisasi membuat pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam mengelola kekayaan asset dalam daerah tersebut. Selain itu, dengan adanya suatu pelaksanaan otonomi pada setiap daerah ternyata mempunyai efek yang baik atau positif pada pelayanan instansi pemerintah daerah kepada masyarakat. Pada saat ini perkembangan yang

ditunjukkan dalam sektor publik terus mengalami perubahan kearah yang baik, perubahan tersebut ditunjukkan dengan adanya suatu penguatan terhadap tuntutan akuntabilitas atas instansi pemerintah darah pusat atau daerah. Bentuk akuntabilitas yang dituntut adalah akuntabilitas financial, sehingga pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menunjukan bukti laporan keuangan atas kegiatan yang telah dilakukan kepada pemangku kepentingan dengan memperhatikan dan memenuhi setiap prinsip dalam melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu serta penyusunan yang dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Laporan keuangan merupakan catatan berupa informasi keuangan yang dapat dijadikan suatu transparansi kegiatan yang telah dilakukan karena pada laporan keuangan tersebut tertera kegiatan yang dilakukan serta berapa besar penggunaan biaya atau dapat dipersingkat laporan keuangan tersebut dapat memberikan gambaran kinerja dalam satu periode akuntansi. Pembuatan suatu laporan keuangan adalah bentuk transparansi kepada pihak pemangku kepentingan yang mempunyai hak untuk mendapatkan laporan keuangan atas apa saja kegiatan yang telah dilakukan dan selanjutnya dengan melihat laporan keuangan tersebut akan dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang pembuatannya tepat waktu dan benar, oleh karena itu dalam pembuatan laporan keuangan dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang

telah memahami sistem akuntansi pemerintah, organisasional pemerintahan dan keuangan daerah.

Selain juga membutuhkan SDM yang telah berkompeten dalam dunia akuntansi, hal yang mendasar dan harus di perhatikan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas adalah sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi serta adanya peran inspektorat daerah. Tujuan dari sistem pengendalian internal adalah supaya laporan keuangan yang dibuat dapat selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan, orang yang membuat laporan keuangan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pemerintahan, dan tujuan pemanfaatan teknologi informasi adalah supaya laporan keuangan dapat dibuat dengan mudah karena didukung software atau hardware yang ada. Terakhir adalah tujuan dari adanya peran inspektorat daerah adalah memberikan konsultasi dan memberikan suatu jaminan kualitas pada laporan keuangan, karena dengan adanya inspektorat daerah tersebut laporan keuangan akan direview atau dilakukan pemeriksaan secara kompleks, sehingga pada akhirnya laporan keuangan tersebut dapat dikatakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP).

Alasan mengapa penelitian ini dilakukan kembali meskipun sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian yang sama adalah karena pada laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah pada kenyataannya (BPK) Badan Pemeriksa Keuangan masih menemukan adanya ketidaksesuaian laporan keuangan, selain itu berdasarkan LKjIP (Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah) presentasi SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan mengalami penurunan dari tahun 2013-2015 (51,28%, 43,59%, 28,21%), alasan yang lain adalah terjadinya pasang surut mengenai hasil laporan keuangan pemerintah yang diperoleh Kabupaten Kulon Progo.

Berikut adalah opini badan pemeriksa keuangan (BPK) pada setiap kabupaten dan kota Yogyakarta. Kabupaten Bantul pada tahun 2012-2014 mendapatkan wajar tanpa pengecualian (WTP), Kabupaten Kulon Progo tahun 2013 dan 2015 mendapatkan WTP, namun pada tahun 2014 WTP dengan taraf penjelasan, kabupaten Gunungkidul 2013-2014 wajar dengan pengecualian (WDP), kabupaten sleman 2013-2014 WAJAR, dan untuk kota Yogyakarta dari tahun 2013-2015 WTP.

Berdasarkan data hasil audit BPK dan LKjIP Kabupaten Kulon Progo, maka peneliti memutuskan untuk meneliti pada Kabupaten Kulon Progo dengan pertimbangan yaitu, adanya pasang surut hasil audit dan penurunan presentase SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan, apakah ada keterkaitan pengaruh sumber daya manusia, pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan peran inspektorat daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti mengambil judul penelitian **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Peran Inspektorat Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah” Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo”**.

Penelitian ini merupakan kompilasi penelitian sebelumnya oleh Erma Setiawati dan Shinta Permata Sari (2014), pada saat itu penelitian dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta, serta penelitian yang pernah dilakukan oleh Siti Soimah (2014) dan Dian Irma D (2014). Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah terdapat pada studi empiris yaitu satuan kerja perangkat daerah kabupaten kulon progo. Selain itu penelitian ini juga menambahkan satu variabel independen baru yaitu “Peran Inspektorat Daerah” variabel tersebut merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Irma Dani pada tahun 2014 Universitas Negeri Padang, penelitian dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pariaman.

B. Batasan Masalah

Penelitian hanya dilakukan pada satu pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, sampel yang digunakan dalam penelitian hanya tertuju pada dinas dan badan yang terdapat dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kulon Progo. Variabel yang digunakan dalam penelitian hanya variabel Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Peran Inspektorat Daerah.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
2. Apakah terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
3. Apakah terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah terdapat pengaruh peran inspektorat daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

D. Tujuan Penelitian

1. Menguji pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Menguji pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Menguji pengaruh peran inspektorat daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pengukur sejauh mana kualitas laporan pemerintah daerah, sudah sesuai dengan standar pelaporan keuangan atau laporan keuangan tersebut dibuat hanya untuk memenuhi syarat laporan tahunan tanpa melihat aspek-aspek yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Aspek pertama adalah SDM yang secara langsung terlibat dalam pembuatan laporan keuangan, aspek kedua yaitu pengendalian internal ketiga adalah pemanfaatan teknologi informasi dan aspek keempat adalah peran inspektorat daerah. Manfaat lain dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi penulis adalah memberikan suatu pengetahuan tentang pengaruh dari sumber daya manusia, pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan peran inspektorat daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dapat menjadi sebuah masukan positif bagi pemerintah dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Manfaat akademis adalah menambah suatu wawasan dan bukti empiris serta ilmu pengetahuan yang berkaitan pada bidang sektor publik.